
MEMBACA URGENSI MODERASI DALAM *MADĪNAH AL-FĀDĪLAH* AL-FARĀBĪ: STUDI WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

**Nurul Khair, Nuri Barezatul Bilqis, Panji Perdana Putra Priyanto,
Sayyida, Farid Hamdani**

Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Timur Tengah dan
Afrika

Email: *timtengka@gmail.com*

ABSTRACT

This paper is a literature review of Al-Farābī's thoughts on the urgency of the value of moderation in the discourse of sustainable development in Indonesia which is studied through his magnumopus entitled "Madīnah Al-Fāḍilah". By using a descriptive-analytical approach, it is concluded that the value of moderation is the main basis for understanding the role and existence of individuals to actualize a variety of sustainable development through the implementation of the 4 pillars of moderation in Al-Farābī's view, namely unity, deliberation, mutual cooperation, and character. The four pillars of moderation in Al-Farābī's view seek to build the closeness of each individual in social life, in order to discuss solving various problems that hinder the factors of sustainable development. The implementation of the 4 pillars of moderation in Al-Farābī's view can be realized through the existence of a leader as an existence that influences the paradigm and behavior of people in a region. That is, leaders are here to unite people of various groups to realize their role and position in order to optimize the value of moderation as the basis for sustainable development in reality. The final result of this paper is to understand the application of Al-Farābī's value of moderation in welcoming sustainable development in Indonesia.

Keywords: *Al-Farābī, Development, Indonesia, Moderation, Sustainable.*

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan telaah pustaka pemikiran Al-Farābi mengenai urgensi nilai moderasi dalam wacana pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang dikaji melalui magnumopusnya berjudul "*Madīnah Al-Fāḍilah*". Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dihasilkan kesimpulan bahwa nilai moderasi merupakan dasar utama untuk memahami peran dan eksistensi individu untuk mengaktualkan ragam pembangunan berkelanjutan melalui implemmentasi 4 pilar moderasi dalam pandangan Al-Farābi, yaitu persatuan, musyawarah, gotong-royong, dan budi pekerti. Keempat pilar moderasi dalam pandangan Al-Farābi berusaha untuk membangun kedekatan setiap individu dalam kehidupan sosial, guna berdiskusi menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat faktor pembangunan berkelanjutan. Implemmentasi 4 pilar moderasi dalam pandangan Al-Farābi dapat direalisasikan melalui eksistensi pemimpin sebagai keberadaan yang mempengaruhi paradigma dan perilaku masyarakat di suatu wilayah. Artinya, pemimpin hadir untuk menyatukan masyarakat berbagai golongan untuk menyadari peran dan kedudukannya guna mengoptimalkan nilai moderasi sebagai landasan pembangunan berkelanjutan di realitas. Hasil akhir tulisan ini, ialah memahami penerapan nilai moderasi Al-Farābi dalam menyongsong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata-kata Kunci: *Al-Farābi, Berkelanjutan, Indonesia, Moderasi, Pembangunan.*

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu yang dikaji dalam kehidupan masyarakat Indonesia guna memenuhi kebutuhan hidup individu di masa sekarang dengan mempertimbangkan keperluan generasi muda di masa mendatang. M. Zaini dalam artikel jurnalnya berjudul "*Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*" menjelaskan isu pembangunan berkelanjutan merupakan kesadaran kelompok masyarakat untuk mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan peran individu untuk menyejahterakan kebutuhan hari ini dan di masa mendatang (Zaini 2015, 27).

Adapun, Tomislav Klarin dalam "*The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issue*" memandang bahwa pembahasan pembangunan berkelanjutan dalam pandangan dunia merupakan upaya individu untuk merespons berbagai permasalahan, seperti penghapusan kemiskinan, perubahan iklim, peningkatan kesehatan, pengembangan pemasukan dan konsumsi negara, penurunan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan kota yang hadir dalam lingkup ekonomi, sosial, serta lingkungan sebagai sikap visioner untuk mencapai tujuan dan harapan global (Klarin 2018, 72-73).

Berdasarkan pandangan M. Zaini dan Tomislav Klarin, dapat diketahui bahwa urgensi utama pembahasan pembangunan berkelanjutan, ialah upaya kelompok individu mengoptimalkan SDA (Sumber Daya Alam) dan peran masyarakat untuk merespons berbagai permasalahan yang menggejolak dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan harapan global di hari ini dan di masa mendatang. Akan tetapi, ragam optimalisasi SDA (Sumber Daya Alam) dan peran masyarakat sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan tidak dapat terealisasi tanpa nilai moderasi yang dipandang sebagai tujuan utama pembahasan pembangunan berkelanjutan.

Mohammad Mulyadi dalam bukunya berjudul "*Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*" menilai bahwa pembangunan berkelanjutan mendorong setiap individu untuk bersatu menyikapi berbagai masalah yang ada dalam kehidupan sosial, tanpa memandang perbedaan suku, bahasa, agama, dan mazhab sehingga individu harus terbuka dan bersatu untuk menghadapi dan mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di realitas (Mulyadi 2015, 11-17).

Pandangan Mohammad Mulyadi dipertegas Retno Setianingtias dalam "*Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*" memandang bahwa masyarakat harus bersikap moderat untuk menyelesaikan problem kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran tanpa mengutamakan keuntungan kelompok, wilayah, agama, dan suku. Implikasinya, kesejahteraan dan kemakmuran yang dipandang sebagai harapan global dapat teraktual dalam kehidupan masyarakat (Setianingtias 2019, 65-66).

Dengan demikian, penjelasan Mohammad Mulyadi dan Retno Setianingtias telah mendeskripsikan bahwa nilai moderasi merupakan salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan Indonesia yang menciptakan ruang keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara global. Kesatuan dan keterbukaan merupakan dua aspek moderasi yang dipandang dapat menjelaskan signifikansi peran individu dan optimalisasi SDA (Sumber Daya Alam) dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, perubahan iklim, peningkatan kesehatan, pengembangan pemasukan dan konsumsi negara, pendidikan, dan pemberdayaan kota di Indonesia. Akan tetapi, kedua aspek moderasi tersebut, tidak dapat teraktual sebagaimana

mestinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia hari ini.

Pusiknas Bareskrim Polri dalam jurnal yang berjudul "*Kriminalitas dan Lalu Lintas: Dalam Angka Tahun 2018 dan Semester I 2019*" menyebutkan kasus kriminalitas mengalami kenaikan dan penurunan berdasarkan jenis tindak kriminal di Indonesia, seperti kasus pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan signifikan dari 949 menjadi 2.193 kasus sepanjang tahun 2018 dan 2019. Sedangkan, kasus pembunuhan dan penipuan mengalami penurunan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Pada tahun 2018, Pusiknas Bareskrim Polri melaporkan sedikitnya 986 kasus pembunuhan terjadi. Selanjutnya, mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 662 kasus. Adapun, kasus penipuan juga mengalami penurunan sebesar 10.545 kasus di tahun 2018 dan 9.452 kasus di tahun berikutnya (Polri 2019, 193-194).

Bahri menjelaskan bahwa ragam tindak kriminal dipengaruhi oleh tingkat pengangguran di Indonesia. Kelompok individu tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk menyambung hidup, akibatnya praktik kejahatan teraktual, sebagaimana pada tahun 2018, tingkat pengangguran Indonesia berada di angka 7.000.691. Selanjutnya, mengalami sedikit peningkatan sebesar 7.000.761 di tahun 2019 (Bahri 2021, 3).

Peningkatan kasus pengangguran yang terjadi di Indonesia dapat dipengaruhi minimnya optimalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya lapangan pekerjaan. Akan tetapi, dasar utama dari berbagai faktor meningkatnya pengangguran, disebabkan oleh kasus korupsi yang terjadi hari ini. Penulis mengutip jurnal Pusiknas Bareskrim Polri yang melaporkan kasus korupsi selama tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2018, diketahui kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sebanyak 687 kasus, selanjut mengalami penurunan sebesar 446 kasus di tahun 2019 (Polri 2019, 195). Tentu, data tindak korupsi menjadi pemantik bahwa penurunan kasus korupsi dapat mempengaruhi peningkatan pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan ragam data di atas, dapat dipahami bahwa tindak kriminal, pengangguran, dan korupsi merupakan kendala utama untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan. Tulisan yang berjudul "***Membaca Urgensi Moderasi dalam Madīnah Al-Fāḍilah Al-Farābi: Studi Wacana Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia***" ini, bertujuan membaca nilai moderasi dalam persepsi Al-Farābi yang dipandang mengutamakan aspek persatuan dan keterbukaan dalam nilai

moderasi antara warga negara dan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengoptimalkan SDM (Sumber Daya Manusia) dan peran individu sebagai langkah menuju pembangunan berkelanjutan di hari ini dan di masa mendatang.

Dalam mengkaji wacana pembangunan berkelanjutan di Indonesia, penulis merujuk salah satu magnumopus Al-Farābi berjudul "*Madīnah Al-Fāḍilah*" untuk memahami urgensi dan kedudukan moderasi, demi menyikapi berbagai masalah kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan penurunan kualitas pendidikan melalui fenomena tindak kriminal, pengangguran, dan korupsi yang dipandang sebagai kendala utama optimalisasi SDM (Sumber Daya Manusia) dan peran individu dalam meraih kesejahteraan sosial. Hasil utama tulisan ini, ialah penerapan nilai moderasi Al-Farābi dalam menyongsong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Makna dan Ragam Pandangan Moderasi dalam *Madīnah Al-Fāḍilah*

Secara etimologi, kata moderasi berasal dari bahasa latin, yaitu *moderatio* yang berarti sesuatu yang bersifat tengah-tengah dari dua eksistensi yang berlawanan (Khair 2021, 134). Dalam bahasa Arab, kata moderation memiliki makna yang sama dengan kata *الوسطية* (*al-wasatīyyah*), ialah sesuatu yang memiliki kedudukan tengah-tengah dari dua eksistensi yang berbeda (Ulinnuha dan Nafisah 2020, 61).

Pemaknaan dalam bahasa Inggris dan Arab menginformasikan bahwa kata moderasi memiliki makna identik dengan kata moderat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderat ialah kecenderungan ke arah dimensi yang seimbang (1), selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, cenderung ke arah dimensi atau jalan tengah, dapat mempertimbangkan pandangan pihak lain (2) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2016).

Murtadha Mutahhari dalam karyanya berjudul "*On the Islamic Hijab*", dikutip melalui penelitian Dewi Lestari "*Konsep Hijab Menurut Murtadha Mutahhari*" menjelaskan makna moderasi ialah tengah-tengah dari dua batas yang berbeda antara satu sama lain (Lestari, 2016: 49).

Pandangan Khaled Abou el Fadl mendeskripsikan bahwa sikap moderasi merupakan penengah terhadap dua jalan yang berbeda satu sama lainnya (Khair 2021, 137). Adapun, menurut Ibn Fāris, dikutip

melalui Fitri, menjelaskan bahwa moderasi atau الوسطية terdiri dari huruf و ط س menunjukkan posisi adil tanpa memihak dari dua kondisi yang berlawanan (Fitri 2015, 46).

Ibn Faris menghubungkan definisinya dengan kata امة وسطا QS. Al-Baqarah [2]:143, bermakna umat berada di tengah-tengah. Makna umat yang berada di tengah-tengah dalam pandangan Ibn Fāris ialah sikap adil yang harus ditunjukkan oleh umat muslim selama berada di dunia, sebagaimana perintah Allah Swt. Berdasarkan berbagai pandangan para pemikir muslim, dapat disimpulkan bahwa moderasi ialah kecenderungan untuk memilih sikap tengah terhadap dua dimensi atau jalan yang berbeda antara satu sama lain. Posisi tengah antara dua dimensi berbeda mendeskripsikan sikap adil individu untuk merespons suatu objek.

Al-Farābi dalam karyanya berjudul “*Madīnah Al-Fāḍilah*” juga menggunakan kata moderasi yang diistilahkan dalam kata “اعتدال” (*‘itidāl*) bermakna kesatuan eksistensi antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pandangan Al-Farābi, moderasi merupakan salah satu ruang untuk membaca kembali perkembangan suatu negara, demi mengetahui tujuan dan harapan ragam individu di realitas. Setiap kelompok individu memiliki tujuan dan harapan untuk meningkatkan mutu dan eksistensinya di realitas (Farābi 2004, 78). Namun, peningkatan mutu dan eksistensi kelompok individu harus diaktualkan secara merata. Jika suatu kelompok individu hanya mementingkan tujuan dan harapan pribadi, maka dipandang akan mengganggu keseimbangan kelompok lain untuk mencapai harapan dan tujuan bersama di realitas.

Pandangan Al-Farābi dipengaruhi oleh Plato dalam karyanya berjudul “*Republic*” yang menjelaskan bahwa orientasi suatu negara adalah meningkatkan kualitas masyarakat dan pengembangan sumber daya alam secara merata untuk merealisasikan kesejahteraan individu. Al-Farābi menyebutkan:

اعتدال برای زندگی اجتماعی، امری ضرورت دارد. زیرا، مردم به تنهایی و انفرادی زندگی آنها قادر نیست به طوری که جمعی کارشان را تحصیل و فضیلت آنها را غنی می کند

“Moderasi memiliki urgensi untuk kehidupan sosial. Karena masyarakat tidak dapat hidup sendiri dan secara individu kehidupan mereka tidak dapat berdiri sehingga bersatunya kehidupan akan mendidik dan memperkaya kesejahteraan masyarakat” (Farābi 2004, 78-79).

Berdasarkan pandangan Al-Farābi di atas, dapat diketahui bahwa moderasi merupakan jalan tengah dan solusi bijak untuk meraih kesejahteraan individu secara merata. Kelompok individu harus bersikap tengah-tengah dan tidak boleh pecah yang mendeskripsikan persatuan sebagai pilar utama moderasi beragama. Sikap tidak boleh pecah dihubungkan dengan tujuan dan harapan individu bahwa masyarakat dari berbagai lapisan, baik pemerintahan, petani, guru, dan dokter yang menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidupnya.

Al-Farābi menjelaskan 4 pilar utama mencapai tujuan dan harapan bersama dalam konteks moderasi, antara lain; persatuan, budi pekerti, musyawarah, dan gotong-royong harus dihadirkan dalam paradigma dan perilaku manusia untuk menyongsong peradaban maju di suatu negara (Sariding 2020, 95). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa moderasi dalam "*Madīnah Al-Fāḍilah*" adalah bersatunya lapisan masyarakat untuk mendiskusikan suatu masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan dan harapan global di realitas.

Gambaran Umum *Madīnah Al-Fāḍilah* dalam Meninjau Konsep Moderasi Al-Farābi

Negara utama atau *Madīnah Al-Fāḍilah* dalam pandangan Al-Farābi merupakan suatu konsep yang menghadirkan diskusi dan musyawarah antara manusia dalam rangka membahas kebutuhan dan kelangsungan hidup di masa mendatang. Al-Farābi dalam menggunakan istilah *al-Ijtima'at al-Insāniyah* mendeskripsikan diskursus kebutuhan dan kelangsungan hidup untuk mencapai suatu kesimpulan sebagai cita-cita dan tujuan akhir yang dapat meningkatkan mutu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di realitas (Mutiani 2020, 33).

Abdullah Said dalam "*Filsafat Politik Al-Farabi*" menjelaskan bahwa cita-cita dan tujuan akhir dalam diskursus kebutuhan dan kelangsungan hidup perspektif *Madīnah Al-Fāḍilah* merupakan indikator utama untuk membaca kebahagiaan dan kesempurnaan suatu negara di realitas. Negara dibangun untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat yang dipandang sebagai kesempurnaan suatu negara. Jika masyarakat tidak merasakan kebahagiaan, maka kesejahteraan dan kemakmuran mengalami masalah yang mengakibatkan negara mengalami masalah atau tidak dipandang sebagai negara utama (Said 2019, 70).

Al-Farābi menjelaskan karakteristik negara utama yang ditinjau melalui pembacaan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang

membutuhkan keberadaan individu lain untuk membicarakan dan mengkaji esensi kesejahteraan dan kemakmuran dirinya dalam rangka memahami kebahagiaan di realitas. Al-Farābi sepakat dengan Plato yang memandang bahwa manusia tidak sebatas hidup untuk memenuhi kebutuhan dirinya, melainkan individu juga membutuhkan keberadaan manusia lain untuk melengkapi hidup dan memberikan arti dan makna eksistensi diri di realitas (Said 2019, 66). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan utama pembahasan negara utama atau *Madīnah Al-Fāḍilah* perspektif Al-Farābi, ialah menyadarkan manusia untuk memahami arti dan makna eksistensinya di dunia, sebagaimana karakteristik dari *Madīnah Al-Fāḍilah*.

Demi memenuhi tujuan *Madīnah Al-Fāḍilah*, Al-Farābi membahas ideologi masyarakat atau warga negara yang dipandang sebagai pemantik untuk meninjau secara berkala arti kebahagiaan dalam diri manusia. Proses meninjau kebahagiaan individu secara berkala dalam dipahami melalui cita-cita setiap masyarakat dalam konteks bernegara. Diketahui bahwa setiap manusia dalam lingkup warga negara menginginkan kehidupan yang damai, tentram, terpenuhinya kebutuhan primer, dan harmonisasi antara individu. Berbagai macam cita-cita di atas, merupakan suatu pengetahuan pasti yang diinginkan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Akan tetapi, cita-cita di atas tidak dapat terlaksana tanpa proses penyatuan paradigma antara setiap individu (Wain 2012, 57). Artinya, setiap masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan harus berdiskusi dan duduk bersama memahami situasi dan masalah yang terjadi untuk menyelesaikan suatu problematika. Tentu, dibutuhkan paradigma terbuka dan sikap tenggang rasa di setiap masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Al-Farābi menawarkan sikap *'itidāl* atau moderasi yang dipandang sebagai solusi sebelum berbicara lebih jauh masalah cita-cita masyarakat (Dwianto 2018, 31).

'itidāl dalam pandangan Al-Farābi merupakan salah satu kajian akhlak atau etika yang menelaah sikap terbuka dan bersatu di tengah kehidupan sosial. Menurut Hayimsyah Nasution, dikutip melalui Abdullah Said, dalam "*Filsafat Islam*" menilai bahwa *'itidāl* dalam kacamata Al-Farābi merupakan ruang pembahasan baru dalam sintesis politik dan filsafat Islam yang menjelaskan keutamaan sikap moderasi untuk bersikap terbuka memahami berbagai perbedaan yang terjadi di realitas, baik perbedaan pendapat, bahasa, budaya, dan kepercayaan yang mengimplikasikan sebagai upaya persatuan setiap individu (Said 2019, 72).

Al-Farābi membaca secara radikal makna negara utama yang dapat diaktualkan melalui sikap moderasi. Moderasi berusaha memantik paradigma toleran dan perilaku terbuka dari berbagai perbedaan. Jika paradigma toleran dan perilaku terbuka telah teraktual dalam kehidupan individu, maka diskusi ideologi atau kebahagiaan masyarakat dapat berjalan dalam rangka menemukan berbagai solusi terhadap permasalahan yang menggejolak di hari ini (Fansobi 2014, 99).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara utama atau *Madīnah Al-Fāḍilah* dalam pandangan Al-Farābi suatu konsep yang membicarakan proses diskusi antara warga negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya di realitas. Proses diskusi berusaha menyampaikan aspirasi atau ide individu dari berbagai lapisan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang dipandang sebagai indikator kebahagiaan. Demi mencapai indikator kebahagiaan individu harus mengaktualkan sikap *'itidāl* atau moderasi untuk meningkatkan kualitas toleransi dan terbuka dalam paradigma dan perilaku individu.

Pandangan Al-Farābi dapat menjadi kajian lebih lanjut untuk membaca diskursus pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Diketahui bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya untuk membicarakan dan mendiskusikan berbagai kebutuhan melalui optimalisasi SDA (Sumber Daya Alam) dan peran masyarakat. Tentu, dibutuhkan sikap musyawarah antara individu untuk membahas optimalisasi SDA (Sumber Daya Alam) bagi kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan berbagai macam pencapaian ideologi manusia (Dwianto 2018, 38). Berdasarkan ragam penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep negara utama atau *Madīnah Al-Fāḍilah* merupakan sebuah cara pandang untuk meninjau lebih jauh problematika moderasi sebagai solusi mengaktualkan ideologi dan karakteristik warga negara dalam rangka merealisasikan kehidupan damai, tentram, terpenuhinya kebutuhan primer, dan harmonisasi antara individu.

Penerapan 4 Pilar Moderasi dalam Tipologi Sosial *Madīnah Al-Fāḍilah*

Tipologi sosial merupakan salah satu pembahasan penting untuk memahami urgensi nilai moderasi dalam "*Madīnah Al-Fāḍilah*". Gatot Suharjanto dalam "*Keterkaitan Tipologi dengan Fungsi*" menjelaskan bahwa tipologi merupakan pendekatan dan cabang ilmu pengetahuan

yang berperan untuk membaca karakteristik dan pengelompokan masyarakat berdasarkan wilayah. Diketahui, setiap kelompok individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti bahasa, warna kulit, kebudayaan, dan kepercayaan (Suharjanto 2013, 976). Adapun Subchi dalam *“Pengantar Antropologi”* memandang bahwa tipologi merupakan kajian antropologi yang membahas corak suatu kelompok masyarakat untuk memahami karakteristik satu sama lain (Subchi 2018, 160).

Berdasarkan dua pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tipologi merupakan suatu kajian yang membahas karakteristik kelompok masyarakat terdiri dari berbagai perbedaan, baik bahasa, warna kulit, kebudayaan, dan kepercayaan. Al-Farābi dalam *“Madīnah Al-Fāḍilah”* menjelaskan tipologi sosial merupakan kondisi masyarakat yang terdiri dari ragam pemikiran, keyakinan, dan perilaku yang memiliki visi dan tujuan yang satu untuk bergerak secara bersama mencapai kesejahteraan dan kemakmuran di realitas. Akan tetapi, perbedaan dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu problem yang sering dikambinghitamkan oleh suatu oknum untuk memecahbelah kelompok lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Al-Farābi dalam *“Madīnah Al-Fāḍilah”* memandang bahwa perbedaan merupakan masalah yang niscaya terjadi dalam lingkup kehidupan sosial, baik pribadi maupun masyarakat yang menghilangkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Akibatnya, masyarakat tidak dapat merealisasikan tujuan dan harapannya di realitas. Al-Farābi menyebutkan bahwa:

تضاد اجتماعی در زندگی انسان می تواند اشکال ضرر و زیان داشته باشد تا مردم باهم دیگر مناظره و مبارزه می کنند

“Konflik sosial dapat mengambil banyak kerugian dan kerusakan dalam kehidupan manusia hingga masyarakat berdebat dan memberontak satu sama lain” (Farābi 2004, 74).

Demi mengatasi berbagai macam penjelasan di atas, Al-Farābi menawarkan konsep *‘itidāl* untuk mengatasi berbagai konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Implementasi *‘itidāl* dalam kehidupan masyarakat sosial dapat diaktualkan melalui pemahaman masyarakat mengenai peran dan eksistensinya di realitas. Masyarakat merupakan bagian inti dalam struktur negara. Sebab, tanpa keterlibatan masyarakat, suatu negara tidak dapat melakukan pembangunan di realitas. Artinya, masyarakat adalah faktor penentu suatu negara mengaktualkan ragam pembangunan untuk memperoleh kemajuan (Khoiri 2019, 12).

Pemahaman masyarakat terhadap peran dan eksistensinya dapat

diimplementasikan melalui peran pemimpin yang menghidupkan ruang persatuan, musyawarah, gotong-royong, dan budi pekerti dalam kehidupan sosial. Pemimpin harus menyuarakan persatuan sebagai tahap awal untuk mengurangi konflik sosial. Budi pekerti harus terealisasi dalam paradigma dan tindakan manusia untuk menghargai derajat satu sama lain bahwa setiap individu memiliki peran dan eksistensi untuk membangun negara (Dwianto 2018, 52).

Musyawarah bahwa kelompok masyarakat harus duduk bersama mendiskusikan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. Pemimpin harus berorientasi untuk membangun keakraban setiap lapisan masyarakat. Gotong-royong dalam pandangan Al-Farābi, ialah masyarakat harus bergerak bersama di bawah arahan pemimpin untuk membangun dan memajukan suatu negara (Mahmuda 2019, 196). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 4 pilar moderasi dalam tipologi sosial memiliki urgensi dan peran untuk menyadarkan masyarakat mengenai sikap tidak pecah, demi meraih tujuan dan harapan bersama yang mendeskripsikan kedudukan moderasi sebagai ruang pembentukan persatuan, budi pekerti, musyawarah, dan gotong-royong dalam tipologi sosial.

Analisis Urgensi Moderasi dalam Wacana Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu wacana yang dikaji dan ditelaah dalam kehidupan masyarakat modern untuk mengoptimalkan kebutuhan masyarakat sekarang dan menunjang generasi muda di masa mendatang. Berbagai pembangunan mulai dirancang sebagai upaya optimalisasi SDA (Sumber Daya Alam) untuk memenuhi kebutuhan hidup kelompok individu (Zaini 2015, 27).

Di satu sisi, wacana pembangunan berkelanjutan juga berusaha merespons berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kelaparan, dan tindak kriminal yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai upaya dan rancangan yang dilakukan dipandang sebagai langkah bijak pemerintah Indonesia untuk menyejahterahkan dan memakmurkan masyarakat yang dipandang sebagai tujuan dan harapan di realitas (Akhmadi 2019, 47).

Rancangan dan optimalisasi SDA (Sumber Daya Alam) merupakan langkah bijak yang harus dilandasi moderasi dalam paradigma dan perilaku masyarakat. Dipahami bahwa masalah kelaparan, kemiskinan, dan tindak kriminal terjadi didasari minimnya nilai moderasi dalam diri

individu. Karena, setiap individu memikirkan kebutuhan dirinya tanpa meninjau dampak bagi kehidupan orang lain. Artinya, terjadi kesenjangan antara individu yang mengindikasikan tidak adanya ruang persatuan (Pratiwi 2020, 232). Di satu sisi, paham ekstremisme dan gerakan separatis juga merupakan aspek penghambat ruang pembangunan. Kelompok masyarakat tidak dapat mengaktualkan pembangunan berkelanjutan dari berbagai sisi, baik ekonomi, pendidikan, dan sosial tanpa sikap gotong-royong dan bersatu (Pratiwi 2020, 235).

Wacana moderasi merupakan salah satu solusi untuk memandang dan membaca perkembangan diskursus pembangunan berkelanjutan, khususnya di Indonesia. Kementerian Republik Indonesia dalam penelitian yang berjudul "*Moderasi Beragama*" menjelaskan bahwa inti dari kajian moderasi adalah seimbang dalam menyikapi berbagai perbedaan dan menjunjung tinggi berbagai asas atau dasar persatuan untuk menciptakan kondisi yang damai dan aman (Kementerian Agama Republik Indonesia 2019, 19). Kondisi damai dan aman dalam isu pembangunan berkelanjutan akan memantik individu-individu dari berbagai tipologi berdiskusi mengenai rancangan dan optimalisasi berbagai peluang yang dapat meningkatkan kemajuan ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat.

Al-Farābi dalam "*Madīnah Al-Fāḍilah*" memandang bahwa tujuan utama konsep moderasi dalam ruang sosial, ialah persatuan. Individu dari berbagai budaya dan bahasa harus bersatu untuk membicarakan masa depan negara dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Potensi-potensi yang dikaji dan ditelaah akan menghasilkan berbagai macam ide dan gagasan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan kepercayaan. Masyarakat harus duduk dan membicarakan masalah yang dihadapi, demi melahirkan gagasan dan sikap tolong-menolong dalam rangka mengatasi berbagai problematika di realitas (Dwianto 2018, 24).

Di satu sisi, Al-Farābi juga menilai bahwa masyarakat harus berpijak pada seorang pemimpin bijak yang menyadari masalah-masalah yang hadir di tengah kehidupan masyarakat. Artinya, pemimpin merupakan ujung tombak untuk mendorong kesatuan masyarakat melalui paradigma yang terbuka dan sikap gotong-royong untuk berdiskusi dan membantu satu sama lain tanpa mengutamakan kepentingan kelompok atau wilayahnya (Farabi 2004, 75).

Dengan demikian, nilai moderasi harus dikembangkan terlebih dahulu untuk membatasi penyebaran paham ekstremisme dan gerakan separatis. Pendekatan utama untuk membatasi paham ekstremisme dan gerakan separatis, ialah menyadarkan setiap individu memahami persatuan untuk duduk bersama mendiskusikan berbagai masalah yang terjadi hari ini dalam menata pembangunan berkelanjutan. Hasil akhir dari nilai moderasi, ialah masyarakat bekerja sama untuk mengatasi berbagai permasalahan, baik kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan penurunan kualitas pendidikan melalui fenomena tindak kriminal, pengangguran, dan korupsi untuk terbuka satu sama lain tanpa adanya pemisah antara setiap kelompok masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa urgensi utama nilai moderasi dalam wacana pembangunan berkelanjutan, ialah mengoptimalkan paradigma dan perilaku masyarakat untuk memahami nilai persatuan, budi pekerti, gotong-royong, dan musyawarah melalui eksistensi seorang pemimpin sebagai landasan atau basis mengaktualkan pembangunan berkelanjutan yang dikaji dan ditelaah hari ini.

Kesimpulan

Berdasarkan ragam penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai moderasi dalam "*Madīnah Al-Fāḍilah*" berusaha menjelaskan urgensi persatuan, budi pekerti, musyawarah, dan gotong-royong untuk menyongsong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Diketahui bahwa pembangunan berkelanjutan berusaha untuk mengoptimalkan kebutuhan masyarakat sekarang dan generasi di masa mendatang dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Akan tetapi, pembangunan berkelanjutan tidak dapat aktual tanpa sikap moderasi yang bertujuan untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Artinya, moderasi memiliki kedudukan sebagai efektivitas rancangan dan gagasan pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, moderasi dalam tipologi sosial juga berusaha menghapus kemiskinan, perubahan iklim, peningkatan kesehatan, pengembangan pemasukan dan konsumsi negara, penurunan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan kota yang hadir dalam lingkup ekonomi, sosial, serta lingkungan sebagai sikap visioner untuk mencapai tujuan dan harapan global di realitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmadi, Agus. 2019. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13 (2): 45-55. <https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. "Moderat." Dalam *KBBI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderata>.
- Bahri, Syaiful. 2021. "Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia dan Determinannya Tahun 2016-2019: Analisis Data Panel." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dwianto, Akbar. 2018. "Konsep Negara Utama (al-Madīnah al-Fāḍilah) al-Farabi dan Relevansinya bagi Negara Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Farābi, Abu Naṣr Al-. 2004. *Arā Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*. Tehran: Ancaman-e Falsafeh-e Iran.
- Fitri, Agus Zaenul. 2015. "Pendidikan Islam Wasathiyah: Melawan Arus Pemikiran Takfiri di Nusantara." *Jurnal Kuriositas* 8 (1): 45-53. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/147>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khair, Nurul. 2021. "Moderasi Ayat-Ayat Hijab dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7 (2): 128-149. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/3088/1671>.
- Khoiri, Ahmad. 2019. "Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya: Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 20 (1): 1-17. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/4372>.
- Klarin, Tomislav. 2018. "The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issue." *Zagreb: Journal Economics and Business* 20 (1): 67-94. <https://ideas.repec.org/a/>

zag/zirebs/v21y2018i1p67-94.html.

- Lestari, Dewi. 2016. "Konsep Hijab Menurut Murtadha Mutahhari." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mahmuda, Mahmuda. 2019. "Konsep Negar Ideal/ Utama Menurut al-Fārābī." *Al-Lubb: Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (JITMC)* 1 (2): 182-198. <http://dx.doi.org/10.51900/lubb.v1i2.7884>.
- Mulyadi, Mohammad. 2015. *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi.
- Mutiani, Tika. 2020. "Negara Utama Menurut Al-Farabi: Konsep dan Relevansinya dalam Kehidupan Bernegara Masa Kini." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 6 (2): 29-42. <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v6i2.6892>.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratiwi, Ananda. 2020. *Indah Moderasi Beragama*. Pare-Pare: Nusantara Press.
- Pusiknas Bareskrim Polri. 2019. "Kriminalitas dan Lalu Lintas: Dalam Angka Tahun 2018 dan Semester I 2019." *Jurnal Data Kriminalitas*, Edisi 2019.
- Said, Abdullah. 2019. "Filsafat Politik Al-Farabi." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1 (1): 67-78. <http://ejournal.radnintan.ac.id/index.php/ijitp/article/view/4097>.
- Sariding, Diding. 2020. "Konsepsi Negara Sejahtera Menurut Al-Farabi." *STAATSRECHT: Indonesia Constitutional Law Journal* 4 (1): 90-108. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/staatsrech/article/view/16127/pdf>.
- Subchi, Imam. 2018. *Pengantar Antropologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Setianingtias, Retno. 2019. "Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 27 (2): 61-74. <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/view/323>.
- Suharjanto, Gatot. 2013. "Keterkaitan Tipologi dengan Fungsi." *Comtech* 4 (2): 975-982. <https://www.neliti.com/publications/168030/>

keterkaitan-tipologi-dengan-fungsi-dan-bentuk-studi-kasus-bangunan-masjid.

- Ulinuha, Muhammad dan Mamluatun Nafisah. 2020. "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab." *SUHUF* 13 (1), 55-76. <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.519>.
- Usaman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta Bumi Aksara.
- Wain, Alexander. 2012. "A Critical Study of Mabādi' Arā Ahl al-Madīna al-Fadīla: The Role of Islam in the Philosophy of Abū Nasr al-Fārābī." *Journal Islamic Philosophy* 8 (2): 45-78. https://www.academia.edu/1789790/A_Critical_Study_of_Mabadi_Ara_Ahl_Madinat_al-Fadilah_The_Role_of_Islam_in_the_Philosophy_of_Abu_Nasr_al-Farabi.
- Zaini, M. 2015. "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi pada Kelurahan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 15 (2): 24-31. <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/9904>.